
*Policy Interventions to Overcome the Impact of Covid19
on Employment in the Tourism Sector*

Herbasuki^{*)}

Abstract

*Policy Interventions to Overcome the Impact of Covid 19 on Employment
in the Tourism Sector*

Abstract

The Covid 19 pandemic (PC 19), which has spread to various parts of the world, has led to a decline in the world economy and an increase in unemployment in all sectors including the tourism sector. The government has taken various policies in overcoming PC 19, namely Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and various other policies that have increasingly caused the deterioration of the tourism sector. Workers who work in the tourism sector are affected by this policy. Many of them were affected by layoffs or the closing of businesses that had been operated for a long time. The purpose of this research is to provide policy advice to the government in order to immediately solve the problem of unemployment, especially in the tourism sector. This study uses a qualitative approach with library data collection methods (desk research). The government with all managed resources are be able to generate quality tourism. The government are able to collaborate with all stakeholders to be able to lift the tourism sector and save workers from a prolonged economic downturn. Collaboration can be realized in a pentahelix model that involves academics, business, community, government and the media.

Keywords: Policy Interventions, Employment, Tourism Sector

**) Dosen Fisip Universitas Diponegoro
email : herbasukinurcahyanto@lecturer.undip.ac.id*

PENDAHULUAN

Covid 19 berawal dari Wuhan, Cina pada awal tahun 2020 dan akhirnya menyebar ke seluruh antero dunia termasuk Indonesia. Shabrina et.al menyebutkan bahwa “*The Covid-19 pandemic incident was a non-natural disaster that was one of the factors in the external environment, resulting in a decrease in tourism activities in Indonesia and China*” (Shabrina Rahma & Fadhilia Arvianti, 2020). Covid 19 merupakan bencana non alam yang berdampak pada penurunan aktivitas pariwisata termasuk di Indonesia.

Sektor pariwisata yang beberapa tahun terakhir mendapatkan prioritas pembangunan juga tidak luput dari dampak PC 19. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi sumber devisa baru untuk meningkatkan penerimaan negara. Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir seperti terlihat dalam Gambar 1 (<https://lokadata.id/data/penyerapan-tenaga-kerja-sektor-pariwisata-2010-2019-1582009409>).

Gambar 1
Penyerapan Tenaga Kerja sektor Pariwisata, 2010 -2019



Sumber : Kemenpar, 2020

Menurut data Kementerian Pariwisata, penyerapan tenaga kerja tahun 2019 mencapai 13 juta orang. Jumlah ini meningkat 3,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase ini meningkat terus sejak tahun 2010.

Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan lainnya untuk mengurangi penyebaran virus Covid 19 menyebabkan daerah tujuan wisata menjadi sepi pengunjung. Pemutusan hubungan kerja terjadi dalam skala besar dan menyebabkan merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga saat ini perekonomian Indonesia sudah masuk dalam kategori resesi. Badan Pusat Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I (Januari-Maret) 2020 hanya tumbuh 2,97%. Pada Kuartal II Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia - 5,32%, sedangkan pada kuartal III, pertumbuhan Indonesia menurun hingga - 3,49 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV masih mengalami resesi sebesar -2,19 persen.

Pemerintah mengumumkan masuknya Covid 19 di Indonesia pada medio Maret 2020 dan selang sebulan kemudian dinyatakan sebagai bencana nasional melalui penerbitan keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020. Dampak Pandemi Covid 19 (PC 19) dapat dikatakan meluluhlantakan hampir semua sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial dan terbesar dalam menyumbang perekonomian negara sebelum ada pandemi seperti dikatakan Uğur et.all. “*the tourism industry was one of the world's greatest markets; until the world met a pandemic in the 21st century*” (Uğur & Akbiyik, 2020).

COVID-19 to tourism industry for affected countries in the worldwide. This study evaluated the impact using supply and demand curve to detect the economic changes in tourism industry. The result shows COVID-19 CREATES panic among public that contributes to lower demand in tourism industry (Bakar & Rosbi, 2020). COVID-19 menciptakan kepanikan masyarakat yang berkontribusi pada penurunan permintaan

industri pariwisata. Wisatawan memutuskan untuk membatalkan atau menunda perjalanan mereka karena adanya berita penyebaran Covid 19, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Mathew et.all yang menunjukkan “*that the tourism sector is easily affected by global crises. It is almost the same day that travelers decide to cancel or delay their trips, with the spread of the news.*” (Mathew & MA, 2020).

Dampak Covid 19 terhadap sektor Pariwisata menyebabkan ancaman kehilangan pekerjaan belasan juta pekerja dan menurunnya kontribusi pada perekonomian Indonesia. Padahal kontribusi sektor Pariwisata pada tahun 2019 mencapai 1.200 triliun rupiah. Pradesh et all mengatakan bahwa pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi terkemuka dan tangguh di dunia sebelum Covid-19, menyumbang 10,4 persen dari PDB Dunia (US \$ 8,8 triliun), mendukung 1 dari 10 pekerjaan (319 juta), secara lebih lengkap dikatakan sebagai berikut : “*Tourism has been one of the world’s leading and resilient economic sectors prior COVID-19, contributing 10.4 per cent of World GDP (US\$8.8 trillion), supporting 1 in 10 jobs(319 million) and predicts a cautious optimism of 3 to 4 per cent growth for 2020 (UNWTO) amidst of volatile and outbreak of the pandemic COVID-19. The Indonesia experienced a decrease of tourist arrivals by 13.5 per cent, Malaysia saw its tourist arrivals decrease by 6 per cent* (Pradesh et al., 2020). Sektor pariwisata mengalami penurunan seiring dengan menurunnya permintaan industri pariwisata. Indonesia mengalami penurunan kedatangan wisatawan sebesar 13,5 persen, sedangkan Malaysia mengalami penurunan kedatangan wisman sebesar 6 persen.

Penurunan kedatangan turis tentu akan menurunkan berbagai hal yang terkait baik langsung maupun tidak langsung sebagai dampak PC 19. Menurut kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dampak PC 19 sangat memprihatinkan. Hotel dan akomodasi ditutup sementara, *mall retail* menurun omsetnya, destinasi wisata ditutup sementara dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) industri pariwisata. Terdapat sekitar 13 juta pekerja langsung yang terancam dari 13 jenis usaha pariwisata. Potensi kehilangan pekerjaan 6 juta hingga akhir tahun 2020 di mana ada yang di-PHK, dirumahkan, atau usaha mandiriya bangkrut. Tenaga kerja yang tidak langsung terdampak sekitar 32,5 juta tenaga kerja yakni UMKM Parekraf, money changer, toko souvenir, penari, pemusik, pekerja seni di daerah wisata, pemasok ke hotel/restoran, pekerja mall/retail, dan lainnya. (Rini, 2020).

Kondisi demikian tentunya sangat membahayakan bagi perekonomian suatu negara. Presiden Jokowi telah memutuskan kebijakan *new normal* dalam penanganan PC19 yaitu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Prinsip utama *new normal* adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. "Secara sosial, kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk *new normal* atau kita harus beradaptasi dengan beraktifitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan, serta bekerja, bersekolah dari rumah," kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Bramasta, 2020).

PC 19 telah mengubah tatanan kehidupan berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali pariwisata. Pariwisata dengan berbagai atraksi yang menarik menjadi kehilangan daya tarik karena tidak ada wisatawan yang berkunjung. PC 19 membatasi pergerakan masyarakat diantaranya menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Pariwisata yang identik dengan kerumunan menjadi hal yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penyebaran virus Corona.

Kondisi ini mengakibatkan banyak destinasi wisata sepi dan banyak tenaga kerja yang terlibat didalamnya baik langsung maupun tidak langsung terkena pemutusan

hubungan kerja atau terpaksa menutup usaha yang dikelola sejak lama. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berjalan lama, pemerintah harus segera melakukan intervensi kebijakan agar pariwisata dapat kembali bangkit. Bagaimana intervensi kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah untuk dapat mengatasi pengangguran sektor pariwisata?.

Tujuan penulisan artikel yaitu membahas intervensi kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran sektor pariwisata.

Manfaat penulisan artikel diharapkan dapat memberikan suatu wacana untuk mengatasi masalah pengangguran sektor pariwisata. Kelesuan pariwisata yang melibatkan banyak pekerja langsung maupun tidak langsung harus diintervensi melalui kebijakan agar dapat kembali beraktivitas dan berkontribusi dalam penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

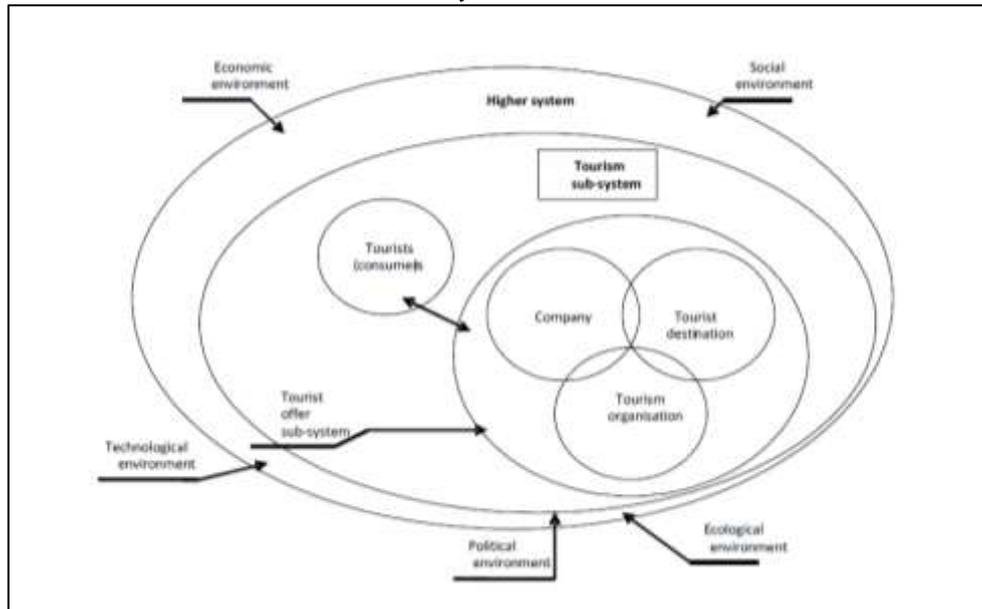
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan (desk research). Pengumpulan data dan informasi yang relevan diambil dari berbagai sumber, sehingga tidak diperlukan terjun langsung ke lapangan tetapi cukup mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Pariwisata merupakan salah satu sumber penerimaan apabila dikelola secara profesional. Pemerintah berusaha untuk menggalakkan pembangunan pariwisata yang bertujuan untuk menghasilkan devisa. Seperti diamanatkan dalam UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata : “bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional” . Lebih lanjut pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut pemerintah telah menyusun PP No 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 – 2025. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan : “Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha”. Kebijakan pariwisata seharusnya dapat mengakomodir berbagai *stakeholders* dengan peran masing-masing agar dapat menampung berbagai aspirasi atau kepentingan berbagai komponen.

Pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi harus melibatkan berbagai pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata suatu daerah. Struktur sistem pariwisata dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, ekonomi, lingkungan dan teknologi yang sangat berperan dalam sub sistem pariwisata seperti terlihat pada Gambar 2. Kunjungan wisatawan tergantung pada daerah tujuan wisata, kelembagaan dan *stakeholders* lain. Berbagai *stakeholders* / pemangku kepentingan yang bersinergi dalam pengembangan pariwisata akan menghasilkan *outcome* yang positif bagi pembangunan daerah. Pendekatan kolaborasi ini muncul sebagai akibat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dalam pembangunan.

Gambar 2
Tourist System Structure

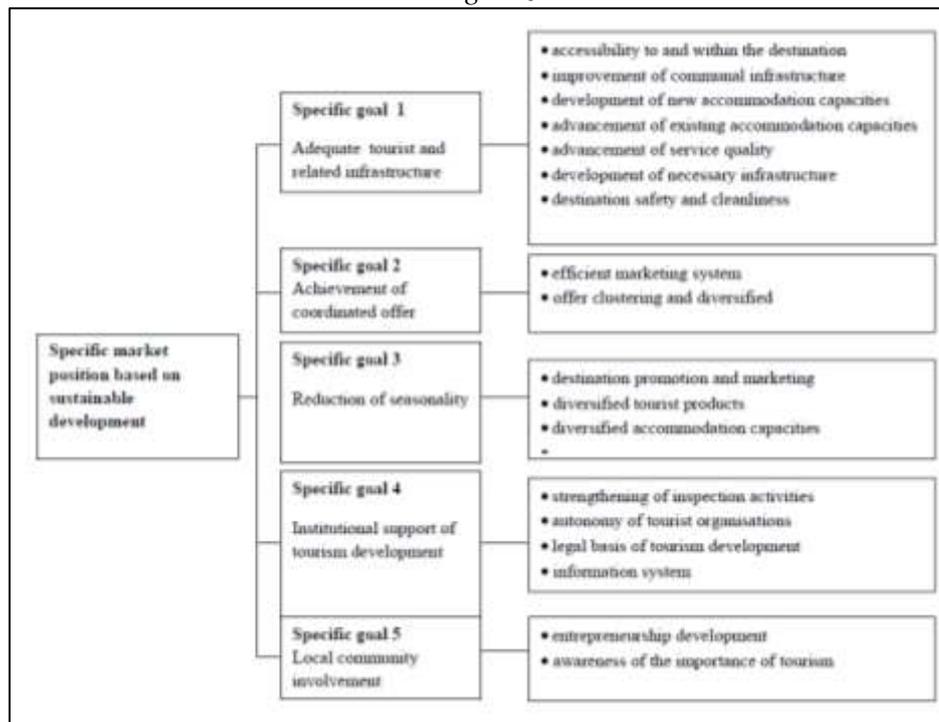


Sumber : Dulčić & Petrić (2001) dalam Jasmina Gržinić and Darko Saftić

Destination Organization Model dalam Gambar 3 menunjukkan lima tujuan yang spesifik. Dalam model tersebut perlu diperhatikan pariwisata berkaitan dengan infrastruktur yang memadai, kegiatan promosi yang terkoordinasi, *reduction of seasonality*, dukungan pemerintah untuk pengembangan pariwisata dan keterlibatan masyarakat lokal. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menuju kelokasi destinasi wisata tetapi juga didalam area destinasi wisata tersebut. Pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk keterlibatan komunitas lokal untuk mengembangkan kewirausahaan dan kesadaran pentingnya pariwisata.

Keterlibatan komunitas lokal menjadi bagian penting dalam memelihara keberlangsungan destinasi wisata. Keberpihakan komunitas lokal kepada wisatawan akan menentukan kondisi keberlanjutan destinasi tersebut. Komunitas lokal harus dengan ramah dan bersahabat menjamu wisatawan agar lebih betah berkunjung dan merasakan keunikan yang ada.

Gambar 3
Destination Organization Model



Sumber : Jasmina Gržinić and Darko Saftić (2012)

Menurut Petric kebijakan pariwisata didefinisikan sebagai : *“sum total of measures of the conscious influence of the state on tourism by means of the necessary instruments that are directed towards the development and improvement of tourism, towards the maintenance of its competitiveness and towards the realisation of economic and noneconomic goals”* (Bartoluci, Mato, 2008). Cakupan kegiatan kebijakan pariwisata menurut Alfier (dalam Bartoluci, Mato, 2008) dapat dilihat pada Gambar 4.

Dalam Gambar 4 terlihat cakupan kegiatan kebijakan pariwisata meliputi berbagai bidang, diantaranya investasi sektor pariwisata, sektor privat, pariwisata lokal, ketenagakerjaan dan pendidikan. Tenaga kerja sektor pariwisata harus selalu meningkatkan ketrampilan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Pekerja sektor pariwisata secara berkesinambungan harus mengikuti proses sertifikasi agar dapat bertahan dan bersaing di dalam dunia kerja sektor pariwisata. Pekerja sektor pariwisata juga harus selalu meningkatkan pengetahuan tentang teknologi informasi yang berkembang dengan cepat. Kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan menjadi hal strategis karena menyangkut sumber daya manusia yang melayani wisatawan.

Gambar 4
The Main Fields of Activity of Tourism Policy



Sumber : Bartoluci, Mato, 2008

PEMBAHASAN

PC 19 telah mengubah semua tata kehidupan masyarakat dalam berbagai lini kehidupan. Presiden telah mengeluarkan kebijakan percepatan penanganan Covid 19 dengan mengeluarkan PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. Kebijakan ini diterapkan dengan berbagai variasi sesuai dengan kondisi daerah. Pada tahun 2021 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro) dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Kebijakan PSBB mengatur berbagai pembatasan kegiatan terkait sekolah, tempat kerja, keagamaan, serta kegiatan di fasilitas umum. Seiring dengan kebijakan tersebut sektor pariwisata menjadi mati suri. Wisatawan tidak ada lagi yang berkunjung di destinasi wisata takut terpapar virus Corona. Daerah destinasi wisata menjadi sepi wisatawan, demikian pula usaha kecil yang menjadi pemasok berbagai kerajinan khas daerah tersebut kehilangan pembeli. Masyarakat sekitar destinasi wisata menjadi ikut terdampak PC 19. Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak karena adanya kebijakan *social distancing* dan menghindari kerumunan.

PC 19 telah memporakporandakan perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi minus dan masuk dalam kategori resesi. Pemerintah telah berusaha dengan segenap sumber daya untuk mengatasi dampak sebagai akibat PC 19 juga secara bersamaan membangun kembali perekonomian nasional. Presiden telah memberikan arahan untuk mengurangi mitigasi sektor pariwisata dengan pertama memberikan perlindungan sosial, kedua realokasi anggaran Kementerian Pariwisata harus diarahkan semacam kedalam program padat karya bagi pekerja-pekerja yang bergerak di bidang pariwisata dan ketiga, penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp 3,8 triliun. Pemerintah

juga memberikan insentif pajak kepada 18 sektor usaha termasuk kepada pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor pariwisata diharapkan dapat bertahan dan bangkit dalam pandemi Covid-19 dengan adanya stimulus tersebut.

Pemerintah telah mengubah kebijakan pariwisata selama PC 19 dari *quantity tourism* menjadi *quality tourism*. UNWTO mendefinisikan *quality of tourism* yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 sebagai berikut :

“quality of a tourism destination as “the result of a process which implies the satisfaction of all tourism product and service needs, requirements and expectations of the consumer at an acceptable price, in conformity with mutually accepted contractual conditions and the implicit underlying factors such as safety and security, hygiene, accessibility, communication, infrastructure and public amenities and services. It also involves aspects of ethics, transparency and respect towards the human, natural and cultural environment”. Aspects of quality also relate to ethics, transparency and respect for the human, natural and cultural environment”

(Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Kata *quality* paling tidak mewakili tiga kata kunci yaitu : pertama, *Professionals Tools*, kedua *Management model* dan ketiga *Powerful Marketing Tool*. Sebagai *Professionals Tools* kualitas dicapai dengan memberikan pelayanan yang baik pada tiga level yaitu : organisasi, operasi dan persepsi. Kualitas juga harus melibatkan komitmen aktif sumber daya manusia, sedangkan dalam destinasi pariwisata kualitas membutuhkan nilai-nilai kejujuran dan keramahan penduduk lokal. Sebagai *Management model* kualitas terletak pada kerangka baru hubungan kerja dengan kompetensi, berarti berorientasi proses. Destinasi berkualitas memerlukan komitmen yang solid dari publik-privat dan antar institusi. Sebagai *Powerfull Marketing Tool* kualitas menempatkan wisatawan sebagai pusat aktivitas dan juga merupakan tujuan pemasaran.

Kualitas harus menjadi bagian manajemen dengan tujuan akhir meningkatkan kinerja dan mengadaptasi penyediaan produk dan layanan, serta memperkuat variabel-variabel kompetitif bagi destinasi wisata. Tanggungjawab dan perilaku untuk melakukan segala sesuatunya lebih baik dengan menghormati masyarakat dan lingkungan adalah masalah etika. *Quality, sustainability, social responsibility, accessibility* menjadi satu, karena tidak mungkin ada kualitas tanpa etika. Konsep *sustainability* memiliki prinsip yang sama dengan *quality* karena pariwisata memerlukan strategi jangka panjang dalam menggunakan sumber daya yang terbatas dan sangat rentan terhadap kerusakan, seperti alam dan warisan manusia. Keberlanjutan baik dalam hal sosial, kultural, ekonomi, dan lingkungan merupakan komponen *quality* dalam pariwisata. Konsep *Quality Tourism* ini akan menjadi acuan dalam penerapan pengembangan kepariwisataan nasional pada masa mendatang.

Konsep *quality tourism* ini dapat dikatakan mirip dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT) yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. Suansri (2003) mengemukakan beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan *Community Based Tourism*. Prinsip tersebut meliputi :

1. Mengakui dan mendukung serta mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata;
2. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek;
3. Mengembangkan kebanggaan komunitas;

4. Mengembangkan kualitas hidup komunitas;
 5. Menjamin keberlanjutan lingkungan;
 6. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal;
 7. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas;
 8. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
 9. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada komunitas;
 10. Berperan dalam menentukan persentase pendapatan.
- (Ahsani et al., 2018)

Quality tourism sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Dulčić & Petrić (2001) tentang *Tourist System Structure* (Gambar 2) dan Jasmina Gržinić and Darko Saftić (2012) dalam *Destination Organization Model* (Gambar 3). Gabungan kedua pendapat tersebut diwujudkan dalam *The Main Fields of Activity of Tourism Policy* seperti yang terdapat dalam Gambar 4. *Quality tourism* harus memperhatikan beberapa aspek antara lain : perencanaan, destinasi pariwisata, investasi, sektor privat, pelayanan dan ketenagakerjaan. Dalam mewujudkan tenaga kerja yang profesional maka program sertifikasi menjadi suatu keharusan agar dapat bekerja secara profesional dan kompeten. Program sertifikasi dilakukan secara akuntabel berdasarkan kebutuhan dan dilakukan melalui kolaborasi dengan unit terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Model kolaborasi muncul sebagai respon terhadap masalah-masalah publik yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan berbagai aktor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berbagai aktor/ *stakeholders* bersinergi sesuai dengan peran masing-masing untuk mengembangkan pariwisata disuatu daerah.

Pengembangan pariwisata membutuhkan intervensi kebijakan yang harus melibatkan berbagai aktor atau *stakeholders*. Interaksi yang sinergik *stakeholders* sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja yang bergerak disektor pariwisata agar lebih kompeten dan profesional. Kebijakan pariwisata yang akan dirumuskan harus melibatkan berbagai *stakeholders* antara lain akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media (Kemenpar, 2016). Keterlibatan kelima aktor ini dikenal dengan pendekatan pentahelix (Sumarto et al., 2020). Masalah yang kompleks dalam pengembangan pariwisata termasuk didalamnya masalah ketenagakerjaan dapat diidentifikasi dan dirumuskan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah melalui melalui pendekatan penthelix.

PENUTUP

Kesimpulan

PC 19 telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam segala lini kehidupan masyarakat termasuk didalamnya sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan menjadi terhenti karena adanya kebijakan pengendalian PC 19, yang berdampak pada sepihnya destinasi wisata, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau kehilangan usaha yang telah dibangun sejak lama.

Pemerintah telah melakukan berbagai intervensi kebijakan untuk mengatasi dampak PC 19, diantaranya refocusing anggaran, pemberian subsidi sektor pariwisata, dan mengubah pendekatan dari *quantity* menjadi *quality tourism* yang berkelanjutan. Pemerintah telah memberikan program padat karya bagi para pekerja di sektor pariwisata dan juga stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi

kreatif sebesar Rp 3,8 triliun. Pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada 18 sektor usaha termasuk kepada pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Quality tourism yang berkelanjutan memerlukan persyaratan kualitas bagi para pekerja yang bergerak di sektor pariwisata agar kompeten dan profesional. Persyaratan kualitas juga berlaku bagi masyarakat sekitar destinasi wisata yang bergerak atau berusaha dalam sektor pariwisata. Pekerja pariwisata harus mendapatkan sertifikasi kompetensi sedangkan masyarakat sekitar harus mendapatkan pelatihan bagaimana melayani wisatawan dengan jujur, ramah dan informatif.

Saran

Dampak PC 19 terhadap ketenagakerjaan sektor pariwisata dapat diatasi dengan intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Pemetaan/identifikasi kebutuhan pekerja sektor pariwisata untuk memudahkan melakukan pembinaan dan sekaligus program sertifikasi, sehingga kebutuhan apa saja yang diperlukan dapat diakomodir oleh pihak yang berwenang untuk dapat direalisasikan.
2. Pembinaan masyarakat sekitar destinasi wisata sebagai pekerja tidak langsung agar dapat melayani wisatawan dengan jujur, ramah dan informatif.
3. Kolaborasi *stakeholders* menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan pekerja sektor pariwisata dan masyarakat sekitar destinasi wisata dengan menggunakan model pentahelix, yang melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 135–146. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2270>
- Bakar, N. A., & Rosbi, S. (2020). Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*. <https://doi.org/10.22161/ijaers.74.23>
- Kemenpar. (2016). Peraturan Menteri Pariwisata no 14 tahun 2016, 1–64.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Rencana Strategis KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF 2020-2024. *Kemenparekraf*, 1–136.
- Mathew, J., & MA, J. (2020). Impact of Covid-19 Pandemic on The Tourism Sector. In *UGC Care Journal*.
- Pradesh, A., Pradesh, A., & Pradesh, A. (2020). Eco-Tourism- The Enabler and Enhancer of Sustainable Growth. *Innovation in Economy & Policy Research*, 1(1), 16–23. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3775009>
- Shabrina Rahma, V., & Fadhilia Arvianti, G. (2020). the Impacts of Covid-19 Pandemic in Indonesia and China'S Hotel Industry: How To Overcome It? *Jelajah: Journal*

Tourism and Hospitality, 2(1), 2020.

<https://www.worldometers.info/coronavirus/?#countries>

Sumarto, R. H., Sumartono, Muluk, K. R. K., & Nuh, M. (2020). Penta-Helix and Quintuple-Helix in the management of tourism villages in Yogyakarta City. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 14(1 Special Issue), 46–57. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v14i1.5>

Uğur, N. G., & Akbıyık, A. (2020). Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison. *Tourism Management Perspectives*, 36(April), 100744. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100744>

Rini, Rina Ayu Panca, Editor : Therisia Felisiani :

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/12/dampak-covid-19-di-sektor-pariwisata-hingga-akhir-2020-15-juta-orang-terancam-kehilangan-pekerjaan>

Bramasta, Dandy Bayu, Editor Sari Hardiyanto :

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/16/164600865/sering-disebut-sebut-apa-itu-new-normal-#>